

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdurrahman A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Ali Achmad dan Santosa Djohari. *Beberapa Asas-asas Hukum Pembuktian dan Asas-Asas Hukum Perjanjian didalam Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1982.
- Aman Tje Putra Edy. *Kredit Perbankan, Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Anisah Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Aprita Serlika. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Makasar: CV. Pena Idris, 2016.
- Aprita Serlika. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” Perspektif Teori*. Malang: Setara Press, 2018.
- Asikin Zaenal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Asikin Zainal. *Mengenal Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.
- Asikin H. Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Asyhadie Zaeny. *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Badruzaman Darus Mariam. *Bab-Bab Tentang Hypotheek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Badruzaman Darus Mariam. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Badruzaman Darus Mariam. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- Badruzaman Darus Mariam. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni, 1997.
- Badruzaman Darus Mariam. *Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Badruzaman Darus Mariam. *Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Bahsan M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djumhana Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Djumhana Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Djumhana Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

- Djumhana Muhamad. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Djumhana Muhamad. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Fuady Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fuady Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fuady Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Fuady Munir. *Hukum Pailit, Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Harsono Boedi. *Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunannya, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 1970.
- Hasibuan Malayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bandung: Bumi Aksara, 2001.
- Hadjon M. Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harsono Budi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Hartanto Andy. *Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitoir Pailit*. Surabaya: Laks Bang Justitia, 2015.

- Hartini Rahayu. *Hukum Kepailitan*, Malang: UPT Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.
- Harun Hazniel M. H. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Pemberian Kredit Perbankan*. Jakarta: IND-HILL-CO, 1995.
- Hasbullah Husni Frieda. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid 2*. Jakarta: Ind-Hill Co, 2002.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ibrahim Johnny dan Efendi Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Iswardono. *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE, 1990.
- Kashadi. *Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Marzuki Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Muljono Liliawati. E. *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Dalam Kaitannya dengan Pemberian Kredit oleh Perbankan*. Jakarta: Harvarindo, 2003.
- Ningsihtedja Titik. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Nurbani Septiana Erlies dan H. S. Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Satu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Nurbani Septiana Erlies dan H. S. Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Dua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kashadi dan Patrik Purwahid. *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2002.
- Kashadi dan Patrik Purwahid. *Hukum Jaminan. Edisi Revisi dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2007.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Mulyadi Lilik. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni, 2010.
- Nating Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pemberesan dan Pengurusan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Patrik Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Poesoko Herowati. *Parate Execcutie Objek Hak Tanggunga. (Inkonsistensi Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008.
- Putra Edy Aman The. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Putra Wyasa. I.B. dan Rasjidi Lili. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003.
- Rahman Hasanuddin. *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sastrawidjaja S. Man. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2006.
- Satrio. J. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Satrio. J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Satrio. J. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992.
- Satrio J. *Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sembiring Sentosa. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

- Sembiring Sentosa. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Setiawan R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A. Bardin, 1999.
- S. H. Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- S. H Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- S. H Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sidharta Arief Bernard, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Sinaga M. Syamsudin. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Sinungan Muchdarsyah. *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*. Jakarta: Yagrat, 1978.
- Sjahdeini Remy Sutan. *Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentun Pokok, dan Masalah Yang Dihadapi Perbankan*. Surabaya: Airlangga University Press, 1996.
- Sjahdeini Remy Sutan. *Beberapa Permasalahan Undang-Undang Hak Tanggungan Bagi Perbankan Dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sjahdeini Remy Sutan. *Hukum Kepailitan: memahami undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan*. Jakarta: Grafiti, 2008.
- Soekarso dan Situmorang Victor. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*,. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

- Sofwan Maschoen Soedewi Sri. *Hukum Perutangan Bagian B*. Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Sofwan Maschoen Soedewi Sri. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Jakarta: BPHN, 2001.
- Subekti R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1987.
- Subekti R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1987.
- Shubhan Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Supramono Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Bandung: Djambatan, 1995.
- Susanto F. Anthon dan Salman Otje. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Susanto F. Anthon. *Dekontruksi Hukum, Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Susanto F. Anthon. *Ilmu Hukum Non Sistematis, Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Susanto Freddy Anthon. *Menggugat Fondasi Filsafat Ilmu Hukum Indonesia, Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2003.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Sutedi Adrian, *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Suyatno Anton. *Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenada, 2012.
- Suyatno dkk. Thomas. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia, 1990.
- Tjiptonagoro. *Perbankan Masalah Perkreditan*. Jakarta: Pradya Paramita, 1989.
- Tumbuan G. Fred. *Himpunan Kebijakan Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Rompegading Melantik A. *Telaah Kritis Perlindungan Hukum Hak Tanggungan Dalam Kepailitan Debitor*. Yogyakarta: Total Media, 2007.
- R. Subekti. dan R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 197.
- R. Subekti. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Usman Rachmadi dan Gazali Djoni S. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Widjaja Gunawan dan Mulyadi Kartini. *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak Tanggungan*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Widjaja Gunawan dan Mulyadi Kartini. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad. *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
Utama Grafiti, 1993.

Widyadharma Ridwan Ignatius. *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*. Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.

Winardi. *Aspek-Aspek Perbankan*. Bandung: Tarsito, 1978.

Wirasmita Rivai A. R. dan Hadiwidjaja, *Analisis Kredit (Dilengkapi Telaah Kasus)*.
(Bandung: Pionir Jaya, 2000.

Yasid Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam, Hukum Barat*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

JURNAL- JURNAL

Adolf Huala. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Masalah Hukum,
Kepailitan: Tinjauan Hukum Internasional dan Penerapannya*. Jakarta:
Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28, No 1, 2009.

Anisah Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Undang-Undang
Kepailitan: Studi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah
Agung*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28, No 1, 2009.

Badrulzaman Darus Mariam. *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*. Jakarta:
Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000.

Hasan Djuhaendah. *Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan*. Jakarta:
Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000.

- Juwana Hikmahanto. *Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17, 2002.
- Lotulung Effendie Paulus. *Kendala-Kendala Prosedural Dalam Penerapan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12, 2001.
- Simanjuntak Ricardo. *Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Pengacara*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17, 2002.
- Simanjuntak Ricardo. *Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga Dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No 4, 2003.
- Sjahdeini Remy Sutan. *Perlindungan Debitor dan Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 5, 1998.
- Sjahdeini Remy Sutan. *Hak Jaminan dan Kepailitan*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000.
- Sjahdeini Remy Sutan. *Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12, 2001.
- Sjahdeini Remy Sutan. *Pengertian Utang Dalam Kepailitan*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17, 2002.
- Sanusi Arsyad M. *Itikad Baik Kepatutan dan Keadilan Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Varia Peradilan No. 103, 1995.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Kopenhandel*) *Staatsblaad* 1847 Nomor 23.

Vendu Reglement (Peraturan Lelang) *Staatsblaad* 1908 Nomor 189). sebagaimana telah diubah dengan *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) *Staatsblaad* 1940 Nomor 56).

Vendu Instructie (Instruksi Lelang) *Staatsblaad* 1908 Nomor 190). sebagaimana telah diubah dengan *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) *Staatsblaad* 1930 Nomor 85).

Credietverband. *Staatsblaad* 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblaad* 1937 Nomor 190.

Reglement op de Rechtsvordering Staatblads 1847-52 jo. *Staatsblaad* 1849 Nomor 63).

Faillissement Verordening Staatblads 1905 Nomor 217 jo. *Staatsblaad* 1906 Nomor 348.

HIR/ RIB (*Het Herziene Indonesisch Reglement*). (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) *Staatsblaad* 1941 Nomor 44.

RBG (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*). (Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) *Staatsblaad* 1927 Nomor 227.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3210 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1984.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 019 K/N/1999 tanggal 9 Agustus 1999.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 43 K/N/1999 tanggal 3 Desember 1999.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 09 PK/N/2004 tanggal 24 September 2004.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01 K/N/2005 tanggal 15 Februari 2005.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 010 K/N/2005 tanggal 18 Mei 2005.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 020 K/N/2006 tanggal 4 September 2006.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 K/N/2006 tanggal 31 Oktober 2006.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2935 K/Pdt/2012 tanggal 10 Juli 2014.

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 04/
Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 62/
Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 63/
Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Jkt.Pst.

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha,
Pembubaran dan Likuidasi Bank.

SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pemerintah
membentuk Pengadilan Niaga pada 4 (empat) wilayah Pengadilan Negeri
lainnya yaitu Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan,
Pengadilan Negeri Suarabaya dan Pengadilan Negeri Semarang.

INSTRUKSI PRESIDEN

Instruksi Presidium Kabinet Republik Indonesia Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 Tentang Pedoman Kebijaksanaan di bidang Perkreditan, sehingga pedoman yang telah digariskan pada waktu itu kini tidak diperlukan lagi.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pencabutan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/Ek/In/10/1966 Tanggal 3 Oktober 1966.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1970 Tentang Penjadualan Dan Atau Pemindahtanganan Barang-Barang Yang Dimiliki/ Dikuasai Negara.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

SURAT KEPUTUSAN dan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Penghapusan Sandera (*Gijzeling*).

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1975 Tentang Penghapusan Sandera (*Gijzeling*).

PERATURAN BANK INDONESIA

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2002 tentang perubahan atas tanggal 12 November 1998 tentang Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 21 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

SURAT KEPUTUSAN BANK INDONESIA

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/68/KEP/DIR tentang Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Cadangan

Atas Aktiva.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 9 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR/ tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Rekstrukturisasi kredit.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/148/KEP/DIR tanggal 21 November 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah tanggal 12 Mei 1999.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 13 Mei 1999 tentang Bank Umum.

SURAT EDARAN BANK INDONESIA

Surat Edaran Bank Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966.

PERATURAN-PERATURAN MENTERI

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 1996 tentang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertifikat Hak Tanggungan.

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 118/PMK.07/2005 Tentang Balai Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 150/PMK.06/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/ PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.06/2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Balai Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 160/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MENTERI

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 476/KMK/II/7/1972 tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pertanggungjawaban Hasil Pelelangan Dan Pungutan-Pungutan Oleh Kantor Lelang Negara dan Kantor Lelang Kelas II.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 376/KMK.09/1995 tentang Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Yang Tersimpan Pada Bank Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/ Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 47/KMK.10/1996 tentang Balai Lelang.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 337/KMK.01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 338/KMK.01/2000 tentang Petunjuk Pejabat Lelang.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 339/KMK.01/2000 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 47/KMK.10/1996 tentang Balai
Lelang.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 509/KMK.01/2000 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 339/KMK.01/2000 tentang Balai
Lelang.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 504/KMK.01/2000 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 334/KMK.01/2000 tentang
Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Dibidang Pengurusan Piutang Negara.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan
Piutang Negara.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 306/KMK.01/2002 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 339/KMK.01/2000 tentang Balai
Lelang.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 450/KMK 01/2002 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 304/KMK.01/2002 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

SURAT EDARAN

Surat Edaran Kepala BUPLN RI Nomor SE-21/PN/1998 Tanggal 13 Juli 1998 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan

dengan Tanah.

Surat Edaran Kepala BUPLN RI Nomor SE-23/PN/2000 Tanggal 13 Juli 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Surat Edaran Kepala BUPLN RI Nomor 19/PN/2000 tanggal 23 Agustus 2000 dan selanjutnya pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

SURAT KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL

Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor KEP-25/PL/2002 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara.

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Nomor 06/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

WEBSITE

www.hukumonline.com

www.detik.com